

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pengaturan mekanisme penyimpanan minuta akta secara elektronik sebagai *ius constituendum*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Adapun hasil penelitian yaitu penyimpanan minuta akta secara elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut. Legalitas penyimpanan minuta akta secara elektronik masih belum diakui eksistensinya, legalitas yang diakui di Indonesia saat ini hanya berupa dokumen elektronik yang telah diatur di beberapa regulasi, dimana setiap regulasi memiliki penentu tingkat keautentikan yang berbeda-beda. Pengaturan penyimpanan minuta akta secara elektronik sebagai *ius constituendum* seiring perkembangan zaman, maka pengaturan minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan di dunia kenotariaatan. Adapun peraturan-peraturan yang mendukung tentang terlaksananya penyimpanan minuta secara elektronik di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan terkait dengan *cyber notary*.

Kata kunci: Notaris, Penyimpanan Minuta Akta, Transaksi Elektronik